



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 79);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun

- 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2108 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 91);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 106);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 107);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 14);

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	266.913.817.847,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.185.543.845.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp</u>	<u>469.031.612.000,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan	Rp	1.921.489.274.847,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	730.249.645.756,00
2) Belanja Hibah	Rp	69.022.087.850,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	28.829.520.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp	6.410.600.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	408.769.225.600,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>500.000.000,00</u> (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.243.781.079.206,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	127.471.500.699,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	427.788.210.669,00
3) Belanja Modal	<u>Rp</u>	<u>182.448.484.273,00</u> (+)
Jumlah Belanja Langsung	Rp	737.708.195.641,00
Jumlah Belanja	Rp	1.981.489.274.847,00
Suplus/(Defisit)	Rp	(60.000.000.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	75.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>15.000.000.000,00</u> (-)
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	60.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

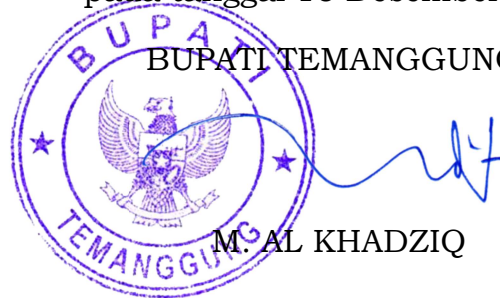
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

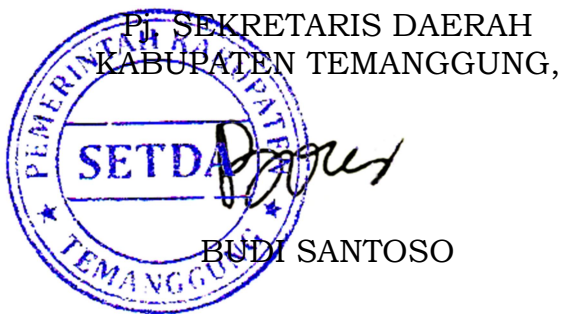
Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 16 Desember 2019



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 81






**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 RINGKASAN PENJABARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.921.489.274.847,00</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	266.913.817.847,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	48.230.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.184.154.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.598.460.500,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	190.901.203.347,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.185.543.845.000,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	52.009.961.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	854.160.529.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	279.373.355.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	469.031.612.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.500.000.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	61.335.725.000,00
4.3.6	Dana Desa	250.756.487.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.981.489.274.847,00</b>
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.243.781.079.206,00
5.1.1	Belanja Pegawai	730.249.645.756,00
5.1.4	Belanja Hibah	69.022.087.850,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.829.520.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	6.410.600.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa	408.769.225.600,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	737.708.195.641,00
5.2.1	Belanja Pegawai	130.555.823.199,00
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	423.937.599.869,00
5.2.3	Belanja Modal	183.214.772.573,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(60.000.000.000,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (silpa)	60.000.000.000,00
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000,00
6.2.5	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>60.000.000.000,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

BUPATI TEMANGGUNG



M. AL KHADZIQ



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.921.489.274.847,00</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	266.913.817.847,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	48.230.000.000,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	240.000.000,00
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	133.000.000,00
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	45.000.000,00
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	38.000.000,00
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	24.000.000,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00
4.1.1.02.01	Restoran	122.075.000,00
4.1.1.02.02	Rumah Makan	55.245.000,00
4.1.1.02.04	Kantin	2.680.000,00
4.1.1.02.05	Katering	820.000.000,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	100.000.000,00
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	92.000.000,00
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	7.000.000,00
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	1.000.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	400.000.000,00
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	285.000.000,00
4.1.1.04.02	Reklame Kain	105.000.000,00
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	10.000.000,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	16.750.000.000,00
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.750.000.000,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	90.000.000,00
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	90.000.000,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	150.000.000,00
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	150.000.000,00
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.100.000.000,00
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.000.000.000,00
4.1.1.12.02	Tunggakkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100.000.000,00
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.400.000.000,00
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.400.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.184.154.000,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	8.209.543.000,00
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	55.000.000,00
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	840.000.000,00
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000,00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.995.653.000,00
4.1.2.01.06.01	Pasar Temanggung	1.255.000.000,00
4.1.2.01.06.02	Pasar Parakan	1.461.000.000,00
4.1.2.01.06.03	Pasar Ngadirejo	605.500.000,00
4.1.2.01.06.04	Pasar Kranggan	397.500.000,00
4.1.2.01.06.05	Pasar Pingit	111.000.000,00
4.1.2.01.06.06	Pasar Candiroto	150.250.000,00
4.1.2.01.06.08	Pasar Ternak Badran	15.403.000,00
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	275.000.000,00
4.1.2.01.14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00
4.1.2.01.17	Retribusi Penempatan Awal Pedagang	2.028.890.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.309.361.000,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	653.900.000,00
4.1.2.02.01.01	Retribusi Pemakaian gedung olah raga	33.000.000,00
4.1.2.02.01.02	Retribusi Pemakaian balai kelurahan	1.600.000,00
4.1.2.02.01.03	Retribusi Pemakaian mesin gilas	80.000.000,00
4.1.2.02.01.04	Retribusi Pemakaian tempat reklame	120.000.000,00
4.1.2.02.01.06	Retribusi Pemakaian gedung pertemuan	381.800.000,00
4.1.2.02.01.07	Retribusi Pemakaian Gedung dan Bangunan	28.500.000,00
4.1.2.02.01.08	Retribusi Pemakaian Perlengkapan Reproduksi	9.000.000,00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	227.986.000,00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	43.475.000,00
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	84.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	300.000.000,00
4.1.2.02.13.01	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Balai Benih Ikan	300.000.000,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.665.250.000,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	65.250.000,00
4.1.2.03.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	1.000.000.000,00
4.1.2.03.11	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100.000.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.598.460.500,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	15.598.460.500,00
4.1.3.01.01	Bank Jateng	5.711.801.500,00
4.1.3.01.02	Perusahaan Daerah Air Minum	2.383.592.000,00
4.1.3.01.03	Perusahaan Daerah Bank Pasar	5.073.192.000,00
4.1.3.01.04	Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo	185.000.000,00
4.1.3.01.05	Perusahaan Daerah BPR BKK Temanggung	1.414.875.000,00
4.1.3.01.07	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	80.000.000,00
4.1.3.01.08	Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata	740.000.000,00
4.1.3.01.09	PT Jamkrida Jateng	10.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	190.901.203.347,00
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	12.000.000,00
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	12.000.000,00
4.1.4.02	Jasa Giro	4.075.032.244,00
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.075.032.244,00
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	7.178.737.879,00
4.1.4.03.09	Rekening Deposito pada bank	7.178.737.879,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000,00
4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	5.000.000,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	10.000.000,00
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.000.000,00
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	8.000.000,00
4.1.4.08.05	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000,00
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	1.589.384.317,00
4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	1.589.384.317,00
4.1.4.15	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	176.898.048.907,00
4.1.4.15.01	Pendapatan Rumah Sakit Umum (RSU)	135.000.000.000,00
4.1.4.15.02	Pendapatan Puskesmas	41.898.048.907,00
4.1.4.15.02.01	Pendapatan Pelayanan Umum Bersumber dari Masyarakat	6.046.515.913,00
4.1.4.15.02.02	Pendapatan Pelayanan Umum Bersumber dari Pemerintah Daerah	884.845.983,00
4.1.4.15.02.03	Pendapatan non Kapitasi JKN Kebidanan	65.225.875,00
4.1.4.15.02.05	Pendapatan Kapitasi JKN	29.886.670.747,00
4.1.4.15.02.08	Pendapatan Lain-Lain BLUD Puskesmas	330.344.679,00
4.1.4.15.02.09	Pendapatan non Kapitasi JKN	4.684.445.710,00
4.1.4.17	Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.125.000.000,00
4.1.4.17.01	Penerimaan LPP Radio Temanggung	25.000.000,00
4.1.4.17.02	Penerimaan LPP Temanggung TV	100.000.000,00
4.1.4.17.04	Penerimaan Sewa Gedung/Bangunan Pemerintah	1.000.000.000,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.185.543.845.000,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	52.009.961.000,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	50.900.100.000,00
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.747.155.000,00
4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	32.965.750.000,00
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	1.105.457.000,00
4.2.1.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	10.081.738.000,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.109.861.000,00
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	268.897.000,00
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	293.194.000,00
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	44.342.000,00
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara	638.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	854.160.529.000,00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	815.241.545.000,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU) Murni	815.241.545.000,00
4.2.2.02	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	38.918.984.000,00
4.2.2.02.01	Bantuan Pendanaan Kelurahan	8.418.000.000,00
4.2.2.02.02	Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	14.807.862.000,00
4.2.2.02.03	Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.693.122.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	279.373.355.000,00
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	58.308.870.000,00
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	19.248.711.000,00
4.2.3.01.01.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan SD	9.961.156.000,00
4.2.3.01.01.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan SMP	7.558.750.000,00
4.2.3.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar	1.349.932.000,00
4.2.3.01.01.08	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	378.873.000,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB	17.300.703.000,00
4.2.3.01.02.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Kesehatan Dasar	7.328.762.000,00
4.2.3.01.02.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.067.276.000,00
4.2.3.01.02.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Kesehatan Farmasi	2.604.665.000,00
4.2.3.01.02.07	Dana Alokasi Khusus (DAK) Keluarga Berencana (KB)	1.300.000.000,00
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi	1.500.000.000,00
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman	3.071.261.000,00
4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan	17.089.569.000,00
4.2.3.01.21	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sosial	98.626.000,00
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	188.346.493.000,00
4.2.3.02.02	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini	13.336.800.000,00
4.2.3.02.03	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	137.906.953.000,00
4.2.3.02.04	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	226.700.000,00
4.2.3.02.05	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	444.477.000,00
4.2.3.02.06	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	19.615.538.000,00
4.2.3.02.07	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.743.624.000,00
4.2.3.02.08	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00
4.2.3.02.09	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.662.881.000,00
4.2.3.02.11	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	944.480.000,00
4.2.3.02.12	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	1.811.763.000,00
4.2.3.02.13	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.795.100.000,00
4.2.3.02.14	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	1.193.204.000,00
4.2.3.02.15	DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	247.615.000,00
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	32.717.992.000,00
4.2.3.03.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	2.286.292.000,00
4.2.3.03.02.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Penguatan Intervensi Stunting	683.091.000,00
4.2.3.03.02.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.603.201.000,00
4.2.3.03.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pariwisata	6.746.467.000,00
4.2.3.03.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan	13.786.656.000,00
4.2.3.03.06.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan	13.476.243.000,00
4.2.3.03.06.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Keselamatan Jalan	310.413.000,00
4.2.3.03.08	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Irigasi	5.026.147.000,00
4.2.3.03.09	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	467.135.000,00
4.2.3.03.09.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	467.135.000,00
4.2.3.03.11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pertanian	3.320.000.000,00
4.2.3.03.12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.085.295.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	469.031.612.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000,00
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	62.439.400.000,00
4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Dasar (SD)	43.148.800.000,00
4.3.1.06.02	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)	19.290.600.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.500.000.000,00
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	94.500.000.000,00
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.919.255.000,00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.184.111.000,00
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.421.017.779,00
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	55.236.114,00
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	33.920.380.107,00
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	61.335.725.000,00
4.3.4.03	Dana Insentif Daerah	61.335.725.000,00
4.3.4.03.04	Katagori Kualitas Realisasi Belanja	7.938.687.000,00
4.3.4.03.08	Katagori Mandatory Spending	250.000.000,00
4.3.4.03.09	Katagori Ketepatan Waktu Pelaporan	250.000.000,00
4.3.4.03.11	Katagori Rata-Rata Nilai Ujian Nasional	10.554.555.000,00
4.3.4.03.14	Katagori Balita yang mendapatkan Imunisasi Lemkap	11.730.462.000,00
4.3.4.03.15	Katagori Persalinan di Fasilitas Kesehatan	9.779.421.000,00
4.3.4.03.18	Katagori Persentase Penduduk Miskin	11.555.571.000,00
4.3.4.03.21	Katagori Perencanaan Pembangunan Daerah	9.277.029.000,00
4.3.6	Dana Desa	250.756.487.000,00
4.3.6.01	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	250.756.487.000,00
4.3.6.01.01	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	250.756.487.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.981.489.274.847,00</b>
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.243.781.079.206,00
5.1.1	Belanja Pegawai	730.249.645.756,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	635.847.068.533,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	380.830.808.042,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	34.109.031.071,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	8.965.080.937,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	24.402.338.610,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	6.219.845.290,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	15.969.459.629,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.415.263.911,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.402.570,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.394.430.923,00
5.1.1.01.10	Uang Paket	86.058.000,00
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	29.414.700,00
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	29.414.700,00
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.317.700,00
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	144.333.000,00
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.917.600.000,00
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	316.303.250,00
5.1.1.01.19	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	2.720.230.000,00
5.1.1.01.21	Tunjangan Reses	1.417.500.000,00
5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi	4.231.200.000,00
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	137.906.953.000,00
5.1.1.01.25	Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	226.700.000,00
5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	444.477.000,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85.135.900.000,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	85.000.000.000,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	135.900.000,00
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.522.000.000,00
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.100.000.000,00
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	2.100.000.000,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	644.677.223,00
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	599.927.223,00
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	2.750.000,00
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	42.000.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	69.022.087.850,00
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	69.022.087.850,00
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	69.022.087.850,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.829.520.000,00
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.112.520.000,00
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	1.112.520.000,00
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	75.000.000,00
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	75.000.000,00
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	27.642.000.000,00
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	27.642.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	6.410.600.000,00
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.810.600.000,00
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.810.600.000,00
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.600.000.000,00
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.600.000.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa	408.769.225.600,00
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	408.769.225.600,00
5.1.7.03.01	Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa bersifat Umum	355.756.487.000,00
5.1.7.03.02	Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa bersifat Khusus	53.012.738.600,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	737.708.195.641,00
5.2.1	Belanja Pegawai	130.555.823.199,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.830.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.882.855.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	221.260.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	108.525.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.479.650.000,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	369.450.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan	739.000.000,00
5.2.1.01.07	Honor Verifikator Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	90.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.361.764.200,00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.468.480.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	57.901.096.000,00
5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	12.784.743.200,00
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12.207.445.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur	1.686.059.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.241.651.500,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	444.407.500,00
5.2.1.04	Belanja Pegawai BOS	13.613.600.000,00
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai BOS SD	9.905.600.000,00
5.2.1.04.02	Belanja Pegawai BOS SMP	3.708.000.000,00
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	12.491.319.999,00
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD RSU	9.588.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.1.05.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	2.903.319.999,00
5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.602.250.000,00
5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	2.522.350.000,00
5.2.1.06.03	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi	157.400.000,00
5.2.1.06.04	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.922.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	423.937.599.869,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.377.518.109,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.192.134.169,00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	18.250.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	224.991.050,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	294.993.100,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.098.750.850,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.017.441.840,00
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran	184.293.700,00
5.2.2.01.08	Belanja Alat-Alat Make Up	32.890.900,00
5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	1.622.095.600,00
5.2.2.01.10	Belanja Alat-Alat Dapur	9.382.200,00
5.2.2.01.11	Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	194.546.200,00
5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	487.748.500,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.395.260.875,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.616.306.905,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	612.692.200,00
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	4.370.000,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.918.685.845,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	685.889.250,00
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Benih Ikan	215.681.600,00
5.2.2.02.07	Belanja Pupuk Tanaman	90.954.900,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pakan Ternak	83.252.000,00
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	22.050.000,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan	683.632.525,00
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	988.858.350,00
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	537.459.200,00
5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	1.216.250.700,00
5.2.2.02.14	Belanja Perbekalan Kesehatan	2.110.827.500,00
5.2.2.02.15	Belanja Bahan Laboratorium	89.460.200,00
5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	320.408.900,00
5.2.2.02.18	Belanja Hadiah Berupa Barang	198.480.800,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.722.013.824,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	865.034.600,00
5.2.2.03.02	Belanja Air	787.171.440,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	16.138.511.392,00
5.2.2.03.04	Belanja Internet	1.789.009.300,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	363.133.800,00
5.2.2.03.06	Belanja Transaksi Keuangan	36.450.000,00
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	61.450.000,00
5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	60.020.000,00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	1.827.520.142,00
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman	537.375.000,00
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.384.331.150,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Uji Laboratorium	274.269.000,00
5.2.2.03.13	Jasa Pelayanan Kesehatan	2.482.763.000,00
5.2.2.03.14	Jasa Persertifikatan Tanah	114.975.000,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	35.067.321.072,00
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	13.184.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	35.054.137.072,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.371.372.600,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	960.614.200,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.485.426.400,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	349.241.100,00
5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	549.245.000,00
5.2.2.05.05	Belanja uji KIR	26.845.900,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.635.195.130,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.015.818.550,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.541.979.680,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	77.396.900,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.108.120.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	5.108.120.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.097.737.500,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.097.737.500,00
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	291.380.000,00
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	21.600.000,00
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Bulldoser	79.890.000,00
5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	189.890.000,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.467.692.300,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	322.117.500,00
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	487.860.000,00
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	459.175.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	438.098.500,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Proyektor	8.500.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Generator	80.200.000,00
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Hiburan	1.072.040.000,00
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Alat Kesenian	20.400.000,00
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Pakaian	82.301.300,00
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Tanah	33.000.000,00
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Satelit	1.459.000.000,00
5.2.2.10.14	Belanja Sewa Peralatan Cuaca dan Meteorologi	5.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.877.265.450,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.173.816.300,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.129.362.100,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.945.390.250,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	17.640.000,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.895.929.800,00
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Acara Khusus	97.127.000,00
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Khusus	618.000.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.175.294.788,00
5.2.2.12.01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	28.552.000,00
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	162.800.000,00
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	45.600.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.606.551.788,00
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	174.800.000,00
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.700.000,00
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	105.291.000,00
5.2.2.12.10	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	12.000.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.090.330.100,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.090.330.100,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.784.082.300,00
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian Korpri	6.000.000,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik/Lurik	781.594.300,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Pramuka	4.000.000,00
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	634.010.000,00
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Ibadah	129.250.000,00
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Jaket	24.000.000,00
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Dinas Upacara Korp Musik	11.250.000,00
5.2.2.14.09	Belanja Pakaian Pasukan Pengibar Bendera	81.473.000,00
5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Sekolah	104.000.000,00
5.2.2.14.11	Belanja Pakaian Hari Tertentu	8.505.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.706.326.485,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.955.789.760,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.750.536.725,00
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	10.000.000,00
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	4.000.000,00
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	4.000.000,00
5.2.2.16.05	Belanja Bantuan Mahasiswa Tugas Belajar	2.000.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	9.640.192.000,00
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	869.730.000,00
5.2.2.17.03	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	2.734.777.000,00
5.2.2.17.04	Belanja Transportasi Pengajar	21.850.000,00
5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	746.770.000,00
5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	5.148.055.000,00
5.2.2.17.07	Belanja Transport Narasumber	119.010.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.959.421.280,00
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.723.974.800,00
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	102.600.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	145.700.000,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.918.796.480,00
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan	68.350.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.962.146.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.561.026.000,00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	401.120.000,00
5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.844.800.000,00
5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa BOS SD	22.624.800.000,00
5.2.2.22.02	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP	11.220.000.000,00
5.2.2.23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	147.304.487.956,00
5.2.2.23.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU	110.322.045.000,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	36.982.442.956,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.24	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.397.327.100,00
5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	22.397.327.100,00
5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	2.652.315.000,00
5.2.2.25.01	Belanja Kepesertaan Pegawai	1.932.500.000,00
5.2.2.25.02	Belanja Kepesertaan Masyarakat	719.815.000,00
5.2.3	Belanja Modal	183.214.772.573,00
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	417.830.000,00
5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan	417.830.000,00
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	541.000.000,00
5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	541.000.000,00
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	5.215.898.000,00
5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Station Wagon	1.500.000.000,00
5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Ambulans	1.976.683.000,00
5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor	807.500.000,00
5.2.3.03.13	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Lift/Elevator	791.715.000,00
5.2.3.03.16	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Khusus	140.000.000,00
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	33.000.000,00
5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	33.000.000,00
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	468.244.400,00
5.2.3.09.01	Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian	34.500.000,00
5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Handsprayer	11.935.000,00
5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu	50.590.000,00
5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	130.579.000,00
5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	240.640.400,00
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	698.215.200,00
5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	18.653.000,00
5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	26.200.000,00
5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	78.500.000,00
5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	44.736.000,00
5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	76.880.200,00
5.2.3.10.09	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	159.925.000,00
5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absen Pegawai	82.500.000,00
5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembersih Lantai	34.500.000,00
5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Genset	91.310.000,00
5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit	50.011.000,00
5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Lemari Es	35.000.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.376.298.430,00
5.2.3.11.01	Belanja Modal Pengadaan Almari	548.722.300,00
5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Brankas	1.000.000,00
5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	92.178.000,00
5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan White Board	6.300.000,00
5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	15.560.000,00
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	458.061.830,00
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	17.495.600,00
5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Televisi	110.053.700,00
5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	237.762.500,00
5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan	163.834.000,00
5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Tralis Jendela	16.680.000,00
5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Unit Files/Kardex/Box	140.000,00
5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Rak	227.080.600,00
5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Locker	7.500.000,00
5.2.3.11.20	Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara (Loud Speaker)	131.739.400,00
5.2.3.11.21	Belanja Modal Pengadaan Amplifier	27.700.000,00
5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	23.000.000,00
5.2.3.11.24	Belanja Modal Pengadaan Microphone dan Kelengkapannya	20.600.000,00
5.2.3.11.25	Belanja Modal Pengadaan Wireles	37.935.700,00
5.2.3.11.26	Belanja Modal Pengadaan Faximili	7.000.000,00
5.2.3.11.27	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	225.954.800,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.887.502.425,00
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	657.931.000,00
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5.839.426.275,00
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book	699.158.700,00
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	426.324.400,00
5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	88.703.400,00
5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	290.100.000,00
5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	130.473.200,00
5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	24.035.100,00
5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	129.344.250,00
5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Software/Program Original	53.475.000,00
5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan	683.971.200,00
5.2.3.12.12	Belanja Modal Pengadaan Sarpras Ktp Elektronik	756.000.000,00
5.2.3.12.13	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Lainnya	108.559.900,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.345.448.900,00



Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	256.578.600,00
5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	176.615.000,00
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	196.647.700,00
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	368.925.800,00
5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Makan	11.840.000,00
5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	209.981.800,00
5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	53.185.000,00
5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar	5.000.000,00
5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja Telpn	475.000,00
5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	57.100.000,00
5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah	9.100.000,00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	146.890.300,00
5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	750.000,00
5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompore Gas	1.903.200,00
5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	20.868.500,00
5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	17.173.100,00
5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	64.867.500,00
5.2.3.14.09	Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set	7.020.000,00
5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur	34.308.000,00
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	412.676.600,00
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	343.876.600,00
5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Hiasan Ruangan	68.800.000,00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.013.406.600,00
5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	469.225.800,00
5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	46.624.000,00
5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Lensa Kamera	12.500.000,00
5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Audio Monitor	105.519.300,00
5.2.3.16.06	Belanja Modal Perlengkapan Studio	292.537.500,00
5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan CCTV	87.000.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	131.360.000,00
5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	50.000.000,00
5.2.3.17.03	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	24.255.000,00
5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	48.105.000,00
5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan PABX	9.000.000,00
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	24.225.000,00
5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.350.000,00
5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	22.475.000,00
5.2.3.18.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Waktu	400.000,00
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	6.906.008.700,00
5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	363.400.200,00
5.2.3.19.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran THT	3.500.000,00
5.2.3.19.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Mata	10.000.000,00
5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi	100.000.000,00
5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Keperawatan	16.832.500,00
5.2.3.19.17	Belanja Modal Peralatan Rumah Sakit	6.412.276.000,00
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.819.722.000,00
5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	348.060.000,00
5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	1.097.662.000,00
5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kedokteran	374.000.000,00
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	59.101.464.224,00
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	59.101.464.224,00
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.355.090.000,00
5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	3.355.090.000,00
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	11.901.354.200,00
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	9.204.624.900,00
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	74.950.000,00
5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.478.935.300,00
5.2.3.23.10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.142.844.000,00
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.421.475.000,00
5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	371.300.000,00
5.2.3.24.05	Belanja Modal Pembangunan Taman	7.025.175.000,00
5.2.3.24.07	Belanja Modal Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25.000.000,00
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.200.000.000,00
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	2.147.000.000,00
5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Komunikasi Data dan Infrastruktur/ Tower	53.000.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	34.594.951.245,00
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	11.890.041.375,00
5.2.3.26.02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan	748.564.400,00
5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	18.582.637.170,00
5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung	1.034.948.300,00
5.2.3.26.12	Belanja Moda Pengadaan Konstruksi Bangunan Atap	605.500.000,00
5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	194.000.000,00
5.2.3.26.16	Belanja Modal Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	918.075.000,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya	621.185.000,00
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	201.200.000,00
5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	13.500.000,00
5.2.3.27.12	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	9.000.000,00
5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	8.750.000,00
5.2.3.27.14	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	9.880.000,00
5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	99.500.000,00
5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	10.570.000,00
5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	50.000.000,00
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan	269.900.000,00
5.2.3.28.03	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	900.000,00
5.2.3.28.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik	240.000.000,00
5.2.3.28.10	Belanja Modal Pengadaan Pakaian Kesenian	29.000.000,00
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	94.010.400,00
5.2.3.30.04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan SAR	50.000.000,00
5.2.3.30.05	Belanja Modal Pengadaan Tenda	42.736.800,00
5.2.3.30.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan Lainnya	1.273.600,00
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	554.390.000,00
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	360.400.000,00
5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan Flaser	49.554.000,00
5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	144.436.000,00
5.2.3.32	Belanja Modal BOS	14.981.000.000,00
5.2.3.32.01	Belanja Modal BOS SD	10.618.400.000,00
5.2.3.32.02	Belanja Modal BOS SMP	4.362.600.000,00
5.2.3.33	Belanja Modal BLUD	17.102.210.949,00
5.2.3.33.01	Belanja Modal BLUD RSUD	15.089.955.000,00
5.2.3.33.02	Belanja Modal BLUD Puskesmas	2.012.255.949,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(60.000.000.000,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (silpa)	60.000.000.000,00
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	60.000.000.000,00
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	60.000.000.000,00
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.1.7.01	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.1.7.01.06	Penerimaan Retensi	15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000,00
6.2.5	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.2.5.01	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.2.5.01.06	Retensi/Jaminan Pemeliharaan	15.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>60.000.000.000,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>


**BUPATI TEMANGGUNG**  
  
**M. AL KHADZIQ**